

Perilaku Komunikasi Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010

H. Harahap, S.S. Agung, B. Ginting, D.S. Gani

Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Gedung KPM IPB Wing I Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797

Abstract

One function of Parliament is to defend the interests of the people in any government program. Function is reflected in the communication behavior of members of Parliament in the event of a hearing. This study aims to describe the communication behavior of members of the Komisi IV DPR RI in a hearing with the Ministry of Agriculture 2010. Communication behavior is observed from the content of the communication messages that include: contents of interests, substance, orientation, type of reason, evidence, clarity, accommodative, and speak act. This study uses content analysis methods and all hearing documents used as research material. The study result (66.1%) a message containing the public interest, the messages (80.1%) according to the substance of the meeting, orientation (42.1%) solution of the problem, type reasons (62.2%) using a factual, a form of evidence (45, 5%) narrative, willingness to accept (65.1%) accommodative, sentences (89.9%) are clear and type speak act (51.9%) using assertive.

Keywords: message contents, strategy, hearing.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pembangunan yang baik bila menyertakan masyarakat sebagai subyek dalam program pembangunan. Dalam mengaktualisasikan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah telah menyediakan mekanisme menampung aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Sebagai wakil rakyat, anggota DPR-RI menjalin komunikasi dengan rakyat secara simultan sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ini selanjutnya diformulasi oleh anggota DPR-RI dan dijadikan masukan pada program-program pemerintah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah.

Sesuai pasal 79 UU No. 27 Tahun 2009 menyatakan, kewajiban DPR-RI antara lain adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat dapat digunakan sebagai bahan

penyusunan program pembangunan pemerintah.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, anggota DPR-RI setiap 3 bulan sekali, melakukan reses. Reses secara formal dilakukan anggota DPR-RI dengan sebutan kunjungan kerja ke daerah. Sewaktu kunjungan kerja tersebut, anggota DPR-RI mengadakan komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk mengetahui keadaan pembangunan dilaksanakan.

Sekembali dari reses, anggota DPR-RI melakukan acara rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang diwakili oleh departemen terkait. Dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, anggota DPR mengevaluasi sejauhmana program pembangunan berpihak kepada kepentingan dan menuju kepada kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR memberikan masukan sesuai aspirasi rakyat yang telah mereka kumpulkan.

Anggota legislatif adalah agen perubahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan. (Kotler & Kotler dalam Newman 1999) Idealnya anggota DPR-RI layak berperan sebagai agen perubahan ke arah yang

mensejahterakan rakyat (Rogers dalam Severin & Thankar 2005). Sebagai agen perubahan pembangunan, anggota DPR-rakyat. Anggota DPR-RI menampung aspirasi berupa kepentingan rakyat, selanjutnya aspirasi tersebut disalurkan kepada pemerintah.

Anggota DPR-RI dengan segala kompetensi yang dimilikinya mempengaruhi pemerintah agar menyusun program pembangunan yang menjawab kepentingan rakyat tersebut. Kompetensi yang dimaksud adalah legalitas kekuasaan politik yang dimiliki, latar belakang partai politik pendukungnya, kemampuan intelektualitas, dan kemampuan retorika dalam menyampaikan pendapat.

Latarbelakang partai dan besar atau partai kecil juga menjadi kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Besarnya partai atau jumlah anggota yang duduk di legislatif menjadi faktor kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah, karena akan banyak suara yang mendukung pendapat yang disampaikan. Pola pengambilan keputusan di badan legislatif adalah berdasarkan suara mayoritas.

Kemampuan intelektualitas yang dimaksud adalah kemampuan analitis untuk mengkritisi setiap persoalan pemerintahan. Kemampuan intelektualitas dapat tergambar dari pendidikan dan pengalaman seseorang. Semakin tinggi pendidikan dan semakin banyak pengalaman pada umumnya membuat seseorang mampu melakukan analisis dan semakin kritis (Lowery & DeFleur 1995).

Kompetensi retorik adalah kemampuan anggota DPR-RI dalam menyampaikan argumentasi sewaktu berkomunikasi dengan pemerintah agar pendapatnya diterima.

RI berperan untuk mempengaruhi pemerintah agar kebijakan berpihak

1.2 Permasalahan

Sejauh ini belum banyak diketahui bagaimana perilaku komunikasi anggota DPR sewaktu rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Pertanyaan yang muncul,

1. Informasi apa yang disampaikan oleh anggota DPR-RI sewaktu mengadakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah?
2. Bagaimana strategi anggota DPR-RI dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah?

DPR-RI adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia yang sangat pluralis. DPR-RI memperjuangkan permasalahan rakyat petani, permasalahan rakyat pedagang, permasalahan rakyat nelayan, dan permasalahan rakyat lainnya. Sehubungan dengan itu, DPR-RI membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan agar dapat membagi bidang pekerjaan.

DPR-RI tahun 2009-2014 membentuk sebelas komisi yang mengurus semua permasalahan dan kepentingan rakyat. Komisi IV DPR-RI salah satu komisi yang khusus mengurus bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Sebagaimana fungsi DPR-RI, Komisi IV bertugas melakukan pengawasan, legislasi, dan anggaran dalam bidang yang dimaksud.

Mitra Kerja Komisi IV DPR-RI adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, dan Dewan Maritim Nasional (DPR-RI 2010)

Anggota DPR-RI periode 2009 – 2014 sudah bekerja lebih kurang 1 tahun pada akhir tahun 2010. Dalam

waktu 3 bulan sekali mereka melakukan reses. Sudah sewajarnya banyak informasi yang diserap, dihimpun, dan diagendakan untuk masukan terhadap kebijakan pemerintah bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Memperhatikan gejala-gejala di atas perlu diketahui lebih lanjut **bagaimana perilaku komunikasi anggota Komisi IV DPR-RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010?**

Penelitian ini adalah untuk menggali perilaku komunikasi anggota DPR-RI komisi IV DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Perilaku komunikasi yang dimaksud adalah untuk mendeskripsikan :

1. Isi agenda komunikasi Komisi IV DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010
2. Muatan kepentingan komunikasi Komisi IV DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010
3. Strategi komunikasi anggota DPR-RI komisi IV dalam menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Rapat Dengar Pendapat sebagai komunikasi politik

Rush dan Althoff (2002) mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses pertukaran informasi dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Sementara, Nimmo (2004) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan segala konsekuensi

kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan. Dengan demikian, komunikasi dapat dipandang sebagai politik, jika pesan yang dibawa itu berusaha untuk mempengaruhi proses kebijaksanaan publik.

Dalam usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik seorang anggota DPR memerlukan kemampuan komunikasi politik. Menurut Norris *dalam* Esser & Pfetsch (2004) *policy maker need accurate information about citizen, to respond to public concerns, to deliver effective services meeting real human needs and also in democracies to maximize popular electoral support to be returned office.*

Retorika

Retorika (Griffin 2006; Fisher 1986) merupakan keahlian berkomunikasi di depan publik agar audien mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Retorika diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles. Istilah retorika sekarang banyak disejajarkan dengan persuasi (Dillard *dalam* Berger *et.al*), karena persuasi dan retorika menekankan bagaimana menyusun strategi komunikasi agar dapat menguasai audien. Aristoteles lebih general menjelaskan aturan dalam retorika mulai dari pemilihan ide, penggunaan bahasa, dan teknik penyajian.

Seorang anggota DPR memerlukan keahlian komunikasi retorika. Misalnya keahlian melakukan komunikasi, kemampuan berbahasa, kemampuan menggunakan istilah, kemampuan mengemukakan pendapat dan lain-lain, (Anderson & Martin 1995). Dengan keahlian retorika yang dimiliki akan memudahkan yang bersangkutan mempengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.

Newsom dan Carrell (2001) Larson (2004) pertama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan menyampaikan pesan adalah penentuan informasi yang akan disampaikan kedua rencanakan bagaimana cara penyajiannya. Pemilihan tema atau topik pembicaraan merupakan pokok persoalan yang ingin disampaikan kepada pihak lain, sedangkan bagaimana cara menyampaikan adalah strategi penyajiannya. Menurut Austin dalam Yu (2002), Masaki (2004), dan Oishi (2006), sewaktu berbicara, seseorang telah melakukan tindakan yang meliputi penyampaian kalimat yang di dalamnya memuat arti dan maksud dari pembicara, Memahami maksud atau makna kalimat pembicara perlu memperhatikan cara penyampaiannya.

Lebih lanjut Searle dalam Lilltejohn & Foss (2008) dan Poythress (2008) menjelaskan, yang penting dalam teori ujaran adalah *illocutionary*, yaitu bagaimana kalimat disampaikan. Searle menggaris bawahi lima tipe dari *illocutionary*, yaitu *assertive*, *directive*, *commissive*, *expressive*, *declarative*.

Assertive merupakan pernyataan yang digunakan pembicara untuk mendukung kebenaran dari proposisi. Hal ini meliputi mengungkapkan, menegaskan, menyimpulkan, dan mempercayai.

Directive, berupa pernyataan berusaha membujuk pendengar untuk melakukan sesuatu. Misalnya pernyataan memerintah, meminta, memohon, berdoa, mengundang, dan sebagainya.

Commissive, yaitu pernyataan yang digunakan pembicara untuk menyatakan tindakan yang akan terjadi. Misalnya pernyataan berjanji, bersumpah, menjamin, berkontrak, dan memberi garansi.

Expressive, yaitu pernyataan mengungkapkan aspek psikologi pembicara, seperti berterima kasih,

mengucapkan selamat, meminta maaf, dan mengucapkan selamat datang.

Declarative yaitu pernyataan yang mengungkapkan apa yang akan dilakukan atau apa yang menjadi pendiriannya. Misalnya pernyataan akan pengangkatan, pernikahan, dan pemberhentian.

Suatu pesan persuasi dengan tema tertentu akan lebih efektif bila mengandung *argument* atau *premise*. *Argument* dan *premise* yang dimaksudkan adalah berupa *proof* atau bukti yang kuat dan cukup. Penyertaan bukti atau *proof* terdiri dari 2 strategi yaitu *reasoning* dan *evidence* (Larson 2004).

Reasoning adalah mengemukakan alasan-alasan agar pesan dipercaya oleh audien. Strategi *reasoning* terdiri dari :

- a. *Cause to effect reasoning*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan berbagai faktor penyebab terjadinya sesuatu.
- b. *Effect to cause reasoning*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan akibat-akibat yang terjadi kemudian mencari penyebabnya.
- c. *Reasoning from symptoms*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada sesuatu yang akan terjadi kemudian.
- d. *Criteria to application reasoning*, yaitu pemberian alasan dengan menguraikan kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi agar sesuatu dapat mencapai hasil yang diharapkan.
- e. *Reasoning from comparation or by analogy*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan perbandingan-perbandingan atau analogi dengan peristiwa sejenis.
- f. *Deductive reasoning*, yaitu pemberian alasan dengan menggunakan logika deduktif. Dari fakta-fakta yang bersifat umum

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- g. *Inductive reasoning*, yaitu pemberian alasan dengan menggunakan logika induktif. Dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Evidence. Strategi lainnya adalah pemberian bukti-bukti agar audien percaya terhadap isi pesan yang disampaikan. Strategi *evidence* ini meliputi:

- a. *Direct experience*, yaitu pemberian alasan dengan bukti dari pengalaman langsung.
- b. *Dramatic or vicarious experience*, yaitu pemberian alasan dengan mendramatisasi atau seolah-olah mengalami sendiri. Dramatisasi terdiri dari empat macam, yaitu
- i. *Narratives*, yaitu menguraikan secara sistematis sehingga menimbulkan kesan dramatis dan lengkap
 - ii. *Testimony*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan pengakuan-pengakuan dari pihak lain sebagai bukti.
 - iii. *Anecdotes*, yaitu pemberian alasan dengan menunjukkan anekdot.
 - iv. *Participation & Demonstration*, yaitu pemberian alasan cara mendemonstrasikan dan mengajak orang lain terlibat melakukannya.
- c. *Rationally processed evidence*, yaitu memberikan bukti yang masuk akal dengan menguraikan secara kronologis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persuasi sangat memerlukan argumen. Pemberian argumentasi ada dua langkah utama dalam meyakinkan audien yaitu pemberian alasan logis dan pemberian bukti.

Dari berbagai faktor di atas, perilaku komunikasi meliputi isi

komunikasi dan cara mengkomunikasikan. Isi komunikasi adalah permasalahan pesan yang disampaikan dan cara penyampaian. Isi komunikasi meliputi muatan kepentingan, substansi dan orientasi. Sedangkan cara penyampaian meliputi : kejelasan, kesediaan menerima, jenis argumentasi, bentuk bukti dan cara penyampaian.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab masalah penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan setiap variabel penelitian dan saling keterkaitan antara variabel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

Dalam penelitian analisis isi, kejelasan atau reliabilitas definisi kategori menjadi faktor penting (Krippendorff 1993). Sehubungan dengan, penelitian analisis isi mengharuskan perumusan definisi kategori secara baik dan dilakukan uji coba, (Stempel III. *et.al* 2003).

Unit analisis yang dimaksud adalah satuan terkecil dari naskah yang dapat dijadikan bahan untuk menemukan kriteria dari definisi kategori. Unit analisis dapat dipilih mulai dari unsur naskah terkecil yaitu huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraph, dan naskah secara keseluruhan (Emmert & Barker 1989; Wimmer & Dominick 2000).

Definisi Kategori

Dari berbagai faktor di atas, perilaku komunikasi meliputi muatan komunikasi dan cara mengkomunikasikan. Muatan komunikasi adalah gambaran isi permasalahan pesan yang disampaikan serta tendensi kepentingan yang menyertainya, sedangkan cara mengkomunikasikan merupakan strategi

yang digunakan untuk mencapai tujuannya.

Definisi kategori Variabel:

Kepentingan yang dibagi menjadi 3 subkategori yaitu: a) kepentingan masyarakat, b) kepentingan pemerintah, dan c) kepentingan politisi.

Substansi dibagi menjadi 3 subkategori yaitu a) substantif, b) prosedural, dan c) gangguan.

Orientasi dibagi menjadi 3 subkategori yaitu: a) pemecahan masalah, b) eksistensi diri dan c) menyudutkan pihak lain.

Jenis alasan dibagi menjadi 7 subkategori yaitu a) sebab akibat, b) gejala, c) kriteria, d) perbandingan, e) logika deduktif, f) logika induktif dan g) tidak mengandung alasan.

Bentuk bukti dibagi menjadi 7 subkategori yaitu : a) pengalaman, b) naratif, c) *testimony*, d) anekdot, e) demonstrasi, f) rasional, dan g) tidak ada bukti

Kejelasan dibagi menjadi dua subkategori yaitu a) jelas dan b) tidak jelas

Akomodatif dibagi menjadi 2 yaitu a) akomodatif dan b) tidak akomodatif

Cara menyampaikan dibagi menjadi 5 subkategori yaitu a) asertif, b) direktif, c) komisif, d) ekspresif, dan e) deklaratif

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh dokumen acara Rapat Dengar Pendapat anggota komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Penelitian menggunakan sensus terhadap semua bahan dokumen rapat dengar pendapat anggota komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

Unit Analisis

Unit analisis masing-masing kategori sebagai berikut:

Kepentingan, Substansi, Orientasi, Jenis Alasan, Bentuk Bukti adalah : Paragraf Kejelasan, Akomodatif, dan Cara penyampaian adalah Kalimat

Ujicoba Kategori

Kepada para juri diberikan definisi yang sudah dirumuskan untuk ditinjau. Selanjutnya definisi tersebut coba diterapkan pada bahan komunikasi yang akan dianalisis dalam jumlah terbatas. Penelitian ini menggunakan juri (*coder*) sebanyak 3 orang ahli.

Selanjutnya hasil pengujian dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan rumus reliabilitas menurut Hoslti (*dalam* Dominick & Dominick 2000) dan diperoleh:

Kepentingan ($r = 0,87$), Substansi ($r = 1,00$), Orientasi ($r = 0,87$), Jenis Alasan ($r = 0,80$), Bentuk Bukti ($r = 0,80$), Kejelasan ($r = 1,00$), Akomodatif ($r = 1,00$), Cara penyampaian ($r = 1,00$) dengan demikian kategori *reliable* dan dapat digunakan dalam menganalisis isi pesan rapat dengar pendapat antara komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

Analisis data

Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS dengan statistik deskriptif dan uji korelasi *Kendall's tau-b*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat RI

Sebagai representasi rakyat, kewajiban anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat yang dijadikan masukan dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok anggota DPR terdiri dari tiga, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Anggota DPR priode 2009-2014 adalah hasil pemilihan dari 11.219 calon legislatif dan 77 daerah pemilihan. Bila

dibandingkan penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,641,326 (BPS 2010) dengan jumlah anggota DPR 2009-2014 sebanyak 560 orang, maka setiap anggota DPR mewakili sekitar 424.360 penduduk.

Badan Kelengkapan

Berkaitan dengan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI, dalam menjalankan fungsinya membentuk alat kelengkapan Pembentukan alat kelengkapan DPR agar dapat menampung semua persoalan kenegaraan. Alat kelengkapan DPR RI antara lain Panitia Khusus dan Komisi.

Komisi

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses.

Dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Kerja, Komisi mengundang pemerintah datang ke kantor DPR untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang ditemukan oleh anggota komisi selama mengadakan kunjungan kerja atau reses.

Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR RI selama tahun 2010 telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian sebanyak tujuh kali. Penelitian ini akan mendeskripsikan perilaku komunikasi antara Anggota Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Perilaku komunikasi yang dimaksud adalah kepentingan siapa yang disampaikan, substansi, orientasi, bentuk alasan, bentuk bukti, kesediaan menerima, kejelasan, dan cara penyampaian.

Sebelum mendeskripsikan perilaku komunikasi, terlebih dahulu digambarkan karakteristik Anggota DPR RI Komisi IV yang beranggotakan 53 orang.

Fraksi

Anggota DPR RI Komisi IV terdiri dari 53 orang yang diwakili oleh 9 fraksi. Jumlah anggota DPR masing-masing fraksi diurutkan dari yang terbanyak adalah Fraksi Demokrat 12 orang (22,6%) , Fraksi Golkar 10 orang (18,9%), Fraksi PDI Perjuangan 10 orang (18,9%), Fraksi PKS (6 orang (11,3%) Fraksi PAN 4 orang (7,5%) Fraksi PPP 4 orang (7,5%), Fraksi PKB 3 orang (5,7%), Fraksi Gerindra 2 orang (3,8%) dan Fraksi Hanura 2 orang (3,8%).

Fraksi Partai Demokrat adalah partai pemerintah yang berkuasa. Fraksi dari partai pemerintah berkuasa cenderung mendukung dan membela kebijakan pemerintah dalam rapat. Karena fraksi Demokrat adalah bagian dari pemerintah yang berkuasa. Enam fraksi DPR adalah tergabung dalam partrai politik koalisi pemerintah. Enam fraksi yang dimaksud adalah (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP). Sudah seharusnya anggota partai koalisi akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jenis kelamin

Anggota DPR RI Komisi IV lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 47 orang (88,6%). Keterwakilan perempuan di komisi IV DPR RI sebanyak 6 orang (11,3 %). Data ini menunjukkan bahwa perempuan kurang tertarik pada politik, karena tidak banyak yang mencalonkan diri dan terpilih sewaktu pemilhan umum tahun 2009.

Bila jumlah dan ketertarikan perempuan dalam legislatif rendah, maka kepentingan perempuan kurang teraktualisasikan. Karena suara yang

memperjuangkan kepentingan mereka akan kecil. Hanya perempuan yang mengetahui secara persis kepentingan perempuan. Walaupun laki-laki bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan, namun laki-laki tidak mengerti sepenuhnya apa yang diinginkan oleh perempuan, (Kramarae dalam Griffin 2006). Diharapkan tumbuhnya kesadaran dan ketertarikan perempuan dalam bidang politik akan member kesempatan kepentingan perempuan dapat diperjuangkan dalam setiap kebijakan politik yang dihasilkan. (Soetjipto 2000).

Umur

Anggota DPR RI Komisi IV memiliki rentang umur termuda 33 tahun dan tertua berumur 68 tahun. Umur Anggota DPR RI Komisi IV lebih banyak (37,7 %) berada pada kelompok 51-60 tahun. Urutan kedua adalah kelompok umur 41- 50 tahun sebanyak 35,8 %. Kelompok umur lebih dari 60 tahun sebanyak 8 orang (15,1%) dan umur dibawah 41 tahun sebanyak 6 orang (11,3%). Data tersebut menunjukkan bahwa umur anggota DPR RI Komisi IV dominan pada umur di atas 40 tahun. Umur di atas 40 tahun menunjukkan kedewasaan dan kematangan psikologis. Karena itu dalam menyampaikan pendapat dapat menahan emosi.

Pendidikan

Tingkat pendidikan anggota DPR RI Komisi IV paling banyak (41,5%) adalah Sarjana strata satu disusul Sarjana strata dua (37,8%), dan Sarjana Strata tiga sebanyak 9,4 %. Sedangkan tingkat pendidikan SMU atau sederajat sebanyak 11,3 %.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dominan sarjana akan menunjukkan kualitas berpikir dan daya analitis yang sangat baik. Pendidikan yang tinggi dapat mengarahkan seseorang untuk

lebih mengedepankan rasionalitas dalam menghadapi masalah.

Pekerjaan

Pekerjaan Anggota DPR RI Komisi IV sebelum terpilih menjadi anggota legislatif lebih banyak sebagai pengusaha 18 orang (34%). Bekerja sebagai aktivis dan politisi masing-masing sebanyak 14 orang (26,4%). Bekerja sebagai dosen sebanyak 3 orang (5,6 %) dan sebagai PNS dan ABRI masing-masing sebanyak 2 orang (3,8%).

Namun bila politisi dan aktivis dipandang sebagai sama-sama ranah politik, maka proporsi bidang pekerjaan anggota DPR Komisi IV sebelum menjadi anggota legislatif didominasi oleh bidang politik (26,4% + 26,8% = 52,8%). Hal ini memberi arti bahwa pekerjaan komunikasi politik sudah terbiasa dilakukan oleh anggota DPR Komisi IV sebelum mereka terpilih menjadi anggota legislatif.

Pengalaman

Pengalaman yang dimaksud adalah priode yang sudah ditempuh menjadi anggota DPR. Sementara priode adalah masa jabatan yang dilalui sebagai anggota DPR sudah ditetapkan 5 tahun. Priode pertama artinya baru tahun 2009-2014 menjadi anggota DPR.

Sebagian besar (56,6%) anggota Komisi IV adalah priode pertama menjadi anggota DPR. Artinya pengalaman mereka menjadi politisi baru beranjak 2 tahun (2009-2010). Pengalaman yang sedikit dapat menjadi faktor kurang memahami mekanisme dan persoalan yang dihadapi. Pengalaman pertama ini dapat pula menjadi pemicu keinginan berkiprah dalam RDP sehingga banyak mengemukakan pendapat.

Bila ditinjau lebih lanjut, anggota komisi IV yang berpengalaman priode pertama berasal dari Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Partai Demokrat, Hanura, dan Gerindra adalah partai

yang baru berdiri dan mengikuti dua masa pemilihan umum 2004-2009 dan 2009-2014. Partai ini masih dianggap baru dalam dunia politik.

Sedangkan anggota yang berpengalaman priode ketiga ke atas berasal dari partai lama seperti Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini sudah berdiri sejak pemerintahan orde baru. Pengalaman anggota partai ini dalam dunia politik sudah sangat banyak.

**PERILAKU KOMUNIKASI
Agenda Rapat**

Perilaku komunikasi yang dimaksud adalah muatan pesan komunikasi dan strategi mengemukakan pendapat oleh Anggota DPRI RI Komisi IV sewaktu mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian.

Selama tahun 2010, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian yang meliputi berbagai agenda.

Tabel 1 Agenda Rapat Dengat Pendapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tahun 2010

No.	Tgl Rapat	Agenda	Tindak Komunikasi	Kalimat	Waktu	Fraksi Dominan
1	Rabu 27, Januari 2010	Realisasi Anggaran Tahun 2009 dan Rencana Anggaran tahun 2010	176	364	7,15 jam	Golkar
2.	Kamis, 25 Februari 2010	Public Service Obligation dan subsidi pupuk sector pertanian	104	149	3,15 jam	Golkar
3.	Rabu, 9 Juni 2010	Membahas tindak lanjut kuker Tj. Priuk dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta	80	1336	5,20 jam	Golkar
4.	Kamis, 26 Agustus 2010	Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin)	129	408	3,30 jam	PKS
5.	Selasa, 31 Agustus 2010	Program Swasembada daging 2014 (13)	54	447	2,30 jam	Golkar
6.	Senin, 6 September 2010	Membahas permasalahan swasembada daging 2014 (9)	24	651	1,15 jam	Golkar
7.	Selasa, 5 Oktober 2010	Membahas Swasembada daging (regulasi impor sapi dan daging, regulasi KUPS) (29)	66	710	3,55 jam	Golkar
Jumlah			633	4065	25.8	
Rataan			90.43	580.71	3.69	

a. RDP Realisasi Anggaran 2009 dan Rencana Anggaran 2010

Selama tahun 2010 dalam rapat dengar pendapat telah terjadi komunikasi anggota komisi IV sebanyak 633 tindakan dan 4065 kalimat. Rapat dengar pendapat yang membahas realisasi anggran 2009 dan rencana anggaran 2010 memakan waktu paling panjang sekitar 7 jam 15 menit dikurangi waktu makan siang. Dalam rapat tersebut terjadi 176 tindak komunikasi dan 364 kalimat yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Dari 43 orang Anggota Komisi IV yang hadir terdapat 26 aktif

menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat yang paling sering dilakukan oleh HKh (Demokrat) sebanyak 18 kali disusul oleh AS (Golkar) sebanyak 17 kali MN (Golkar) sebanyak 15 kali.

b. RPD Public Service Obligation

Agenda rapat tentang Public Service Obligation (PSO) bidang pertanian menghabiskan waktu 3 jam 15 menit. Dalam rapat tersebut terjadi 104 tindak komunikasi dan 149 kalimat. Dari 53 anggota Komisi IV hadir sebanyak 44 orang dan terdapat 16 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak

mengutarakan pendapat adalah MNI (Golkar) sebanyak 19 kali disusul oleh AS (Golkar) sebanyak 14 kali.

c. RDP Tindak Lanjut Kunker Tj. Priuk

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang kedua terpanjang adalah Agenda rapat Tindak lanjut Kunker Tj Priuk dan Audiensi Himpunan Pedagang Unggal Jakarta menyita banyak waktu (5 jam 20 menit). Dalam membahas agenda ini dapat diketahui terjadi 80 tindak komunikasi dan 1336 kalimat. Dari 30 Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir, sebanyak 9 orang aktif menyampaikan pendapat. Anggota yang paling banyak menyampaikan pendapat adalah AS (Golkar) 23 kali disusul oleh MN (Golkar) sebanyak 14 kali dan Am (Demokrat) sebanyak 13 kali.

d. RPD Raskin

Agenda rapat tentang Beras untuk orang miskin (Raskin) menghabiskan waktu 3 jam 30 menit. Dalam rapat tersebut terjadi 129 tindak komunikasi dan 408 kalimat. Dari 18 Anggota Panja yang hadir terdapat 11 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak mengutarakan pendapat adalah HS (PKS) sebanyak 22 kali disusul oleh SYH (Golkar) sebanyak 21 kali.

b. RDP Program Swasembada Daging 2014

Agenda rapat tentang Program Swasembada daging 2014 menghabiskan waktu 2 jam 30 menit. Dalam rapat tersebut terjadi 54 tindak komunikasi dan 557 kalimat. Dari 25 anggota Panja Komisi IV hadir sebanyak 13 orang dan terdapat 7 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Panja Komisi IV yang paling banyak mengutarakan pendapat adalah FS (Golkar) dan MN (Golkar) masing-masing 11 kali disusul oleh MD (Gerindra) sebanyak 10.

c. RDP Persmasalahan Swasembada Daging 2014

Agenda rapat tentang Permasalahan Swasembada daging 2014 menghabiskan waktu 1 jam 15 menit. Dalam rapat tersebut terjadi 24 tindak komunikasi dan 651 kalimat. Dari 25 anggota Panja Komisi IV hadir sebanyak 16 orang dan terdapat 4 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Panja Komisi IV yang paling banyak mengutarakan pendapat adalah FS (Golkar) dan 13 kali disusul oleh IM (PPP) sebanyak 5 kali.

a. RDP Swasembada Daging 2014 (Regulasi Import Sapi dan Daging)

Agenda rapat ketiga [aling banyak menghabiskan waktu 3 jam 55 menit adalah rapat pembahasan regulasi import sapi dan daging. Dalam rapat tersebut terjadi 66 tindak komunikasi dan 710 kalimat yang diutarakan. Dari 20 Anggota Panja yang hadir terdapat 10 orang yang mengutarakan pendapat. Anggota Komisi IV yang paling banyak mengutarakan pendapat adalah MN (Golkar) sebanyak 12 kali kemudian IM (PAN) dan VYM (PKB) masing-masing 10 kali.

Pada table 2 dapat digambarkan tentang tingkat kehadiran dan partisipasi dalam rapat, Bila dilihat dari tingkat kehadiran para anggota Komisi IV dalam RDP, paling tinggi kehadirannya sewaktu membahas masalah Public Service Obligation Pertanian di mana hadir sebanyak 81,13%. Sedangkan yang paling rendah tingkat kehadirannya adalah sewaktu membahas Program Swasembada Daging 2014 yakni hadir 52.00%.

Namun bila ditinjau dari tingkat partisipasi yang hadir dalam RDP, yang paling tinggi tingkat partisipasinya adalah sewaktu membahas Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yakni sebanyak

61.11 %. Sedangkan yang paling rendah tingkat partisipasinya sewaktu

membahas Permasalahan Swasembada Daging 2014 yakni 25.00%.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Anggota Komisi IV DPR dalam RDP dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010
N = 53

No.	Agenda	Peserta Hadir (%)	Partisipasi (%)
1	Realisasi Anggaran Tahun 2009 dan Rencana Anggaran tahun 2010	43 dari 53 anggota (81.13)	26 (60.47)
2.	Public Service Obligation dan subsidi pupuk sector pertanian	44 dari 53 anggota (83.02)	16 (36.36)
3.	Membahas tindak lanjut kuker Tj. Priok dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta	30 dari 53 anggota (56.60)	9 (30.00)
4.	Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin)	18 dari 25 Panja (72.00)	11 (61.11)
5.	Program Swasembada daging 2014 (13)	13 dari 25 Panja (52.00)	7 (53.85)
6.	Membahas permasalahan swasembada daging 2014 (9)	16 dari 25 Panja (64.00)	4 (25.00)
7.	Membahas Swasembada daging (regulasi impor sapi dan daging, regulasi KUPS) (29)	20 dari 25 Panja (80.00)	10 (50.00)

Dari 7 jenis persoalan yang dibahas selama tahun 2010, ada dua masalah yang berhubungan langsung dengan petani dan masyarakat bawah, yaitu Subsidi Pupuk dan Beras Untuk Masyarakat Miskin. Sedangkan persoalan lainnya berhubungan tidak langsung dengan kepentingan masyarakat petani. Keberpihakan kepada petani tampak lemah dalam memilih agenda rapat dengar pendapat.

Permasalahan swasembada daging banyak menyita perhatian Anggota Komisi IV DPR RI dengan mengagendakan 3 pertemuan. Pentingnya masalah ini membuat Komisi IV membentuk Panitia Kerja Daging.

Program swasembada daging tahun 2014 dijadikan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian sebagai program unggulan cukup beralasan. Karena pertumbuhan sektor peternakan sejak tahun 199-2003 cukup

signifikan 3,2 % dibandingkan dengan sektor pertanian yang hanya mencapai 2,0 %. Di sisi lain jumlah petani yang terlibat dalam sektor peternakan semakin meningkat 5,62 juta pada tahun 1999 menjadi 6,51 juta pada tahun 2003 (Ilham 2010).

Program Swasembada Daging memang telah tiga masa pemerintahan dijadikan prioritas pembangunan pertanian, yaitu tahun 2005, 2010, dan 2014. Dua priode rencana pembangunan selalu gagal. Mempelajari kegagalan pada tahun 2005 dan 2010 telah menjadi modal bagi Kementerian Pertanian agar swasembada daging 2014 sangat mungkin tercapai.

Beberapa kali kegagalan program ini pula yang menjadikan perhatian anggota Komisi IV DPR RI tinggi pada program swasembada daging 2014. Komisi IV DPR RI menjadikan swasembada daging 2014

sebagai agenda serius dan jangan sampai gagal. Keseriusan Komisi IV terhadap program swasembada daging 2014 ditandai dengan pembentukan Panitia Kerja. Panitia Kerja ini bertugas untuk mengawal program swasembada daging 2014 tidak gagal lagi.

Pemerintahan Indonesia tahun 2009-2014 dijalankan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dikenal dengan pemerintahan koalisi. Pemerintahan koalisi adalah pemerintahan yang didukung oleh beberapa partai koalisi (bekerjasama) menjalankan pemerintahan. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II didukung oleh enam partai koalisi yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemerintahan eksekutif koalisi diikuti juga oleh anggota legislatif yang berkoalisi. Menjadi wajar bila program eksekutif didukung oleh anggota legislatifnya. Kementerian Pertanian mengusulkan program swasembada daging 2014 maka anggota DPR mendukungnya dan menjadikannya sebagai agenda rapat dengar pendapat.

Muatan kepentingan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 418 (66,1%) tindakan komunikasi memuat kepentingan masyarakat. Sebanyak 147 (23,2%) memuat kepentingan pribadi politisi dan

sebanyak 68 (10,7%) memuat kepentingan pemerintah.

Data tersebut memberikan arti bahwa anggota komisi IV DPR RI lebih banyak menyampaikan pesan komunikasi yang mengandung kepentingan masyarakat atau konstituen. Anggota Komisi IV lebih banyak membawa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Rendahnya muatan pesan yang mengandung kepentingan pemerintah adalah suatu gambaran bahwa anggota Komisi IV telah menunjukkan aspek pengawasan yang lebih baik. Artinya anggota DPR komisi IV bekerja lebih banyak untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Muatan kepentingan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 lebih dominan (66,1%) mengandung kepentingan masyarakat atau konstituen. Hal ini sesuai dengan fungsi DPR sebagai penyambung lidah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Anggota Komisi IV telah menyampaikan pendapat kepada Kementerian Pertanian yang mengandung kepentingan masyarakat. Pendapat yang disampaikan baik berupa pertanyaan, usul, teguran, dan minta penjelasan adalah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Bila muatan kepentingan dikorelasikan dengan karakteristik anggota komisi IV DPR hasilnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Korelasi antara karakteristik dengan muatan kepentingan N= 633

Kepentingan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Fraksi	Masa Bakti	Pekerjaan
r	.028	-.022	.034	-.040	.006	.116**
Sig	.462	.497	.349	.245	.869	.001

** . Korelasi signifikan pada level 0.01.

Dari tabel di atas dapat diketahui pekerjaan yang berkorelasi signifikan ($r=0,116$ $p=0.001$) dengan muatan kepentingan. Artinya pekerjaan yang

berbeda akan diikuti oleh perbedaan muatan kepentingan yang disampaikan.

Masyarakat menuntut kita menjalankan peran sebagaimana tuntutan peran tertentu. Sebagaimana

dikatakan oleh Matthew Arnold (dalam Brooker 1998) kita dituntut untuk berperilaku sebagaimana orang lain inginkan, yang dijelaskan dengan istilah ‘*Doing as one Likes*’. Bila tidak, kita dipandang telah melakukan pelanggaran atas peran yang diharapkan. Pada umumnya kita tidak suka melanggar atau keluar dari norma yang telah digariskan oleh masyarakat. Seseorang melakukan tindakan seperti menjalankan peran dalam sandirwara kehidupan.

Dalam interaksi dengan manusia lain, seseorang akan berperilaku sesuai dengan tuntutan peran yang diemban. Anggota Komisi IV DPR RI menyuarakan kepentingan rakyat karena mereka menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat atas peran yang mereka emban. Peran seorang anggota DPR yang diharapkan masyarakat adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga pemerintah menyusun program pembangunan yang berpihak rakyat. Muatan pesan komunikasi anggota Komisi IV DPR RI yang dalam rapat dengar pendapat dengan

Kementerian Pertanian tahun 2010 lebih banyak mengandung kepentingan masyarakat atau konstituen.

Substansi

Hasil penelitian menunjukkan, pesan yang disampaikan lebih banyak (80,1%) mengandung substansi permasalahan, prosedural 17,1% dan gangguan 2,8%. Data ini memberi arti bahwa selama rapat dengar pendapat anggota DPR Komisi IV membicarakan hal-hal yang substantif, sesuai dengan agenda rapat. Dapat disimpulkan bahwa anggota Komisi IV menyampaikan permasalahan yang substantif dan fokus pada persoalan yang sedang dibahas.

Walaupun anggota Komisi IV telah sering melakukan rapat dengar pendapat, ternyata masih terdapat 17,1 % yang membicarakan prosedural atau mekanisme rapat. Umumnya yang dibicarakan dalam prosedural adalah bagaimana supaya rapat efisien dalam penggunaan waktu, anggota jangan berpanjang-panjang dalam menyampaikan pendapat.

Apabila karakteristik dikorelasikan dengan substansi isi pesan, maka dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut:

Tabel 4. Korelasi antara karakteristik dengan substansi pesan
N= 633

Substansi	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Fraksi	Masa Bakti	Pekerjaan
r	.020	.037	.088*	-.051	.050	-.003
Sig	.619	.261	.019	.141	.170	.946

*. Korelasi signifikan pada level 0.05.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya pendidikan yang berkorelasi signifikan (r=0,088 p=0.019) dengan substansi pesan. Artinya tingkat pendidikan yang berbeda akan diikuti oleh perbedaan substansi pesan yang disampaikan.

Besarnya prosentase pesan yang substansi pada permasalahan sesuai dengan penjelasan *activity theory* (EngestÓrm dalam Kaptelinin dan Nardi 1997). Menurut penjelasan teori tersebut, bila seseorang dihadapkan

pada suatu persoalan, seseorang akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Perilaku seseorang didorong oleh motif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan alat yang tersedia dan bekerjasama dengan orang lain. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan aturan dan konteks. Struktur tindakan yang diambil terdiri dari norma, pembagian kerja dan konteks.

Rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 sudah direncanakan dan dijadwalkan. Artinya masalah yang akan dibahas sudah diagendakan sebelumnya. Agenda rapat tersebut diberitahukan kepada peserta tentang tema yang akan dibahas. Sesuai *activity theory*, agenda ini menjadi masalah bagi anggota Komisi IV DPR RI yang perlu dicari jalan keluar. Bersama-sama dengan anggota lain mereka membahas setiap agenda agar diperoleh jalan keluar yang terbaik. Dalam Tata tertib DPR telah diberikan mekanisme rapat sebagai aturan. Secara bersama-sama mereka mencari solusi yang terbaik. Solusi yang diambil perlu mencapai kesepakatan untuk dijadikan kesimpulan. Kesimpulan rapat sangat tergantung pada konteks (waktu dan situasi) rapat.

Tema atau agenda rapat yang diberitahukan sebelumnya merupakan masalah bersama yang akan dicari solusi oleh anggota Komisi IV DPR. Sewaktu hadir dalam rapat dengar pendapat, para anggota sudah menyadari permasalahan yang akan dibahas dan sudah memikirkan solusinya. Atas permasalahan inilah para anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat, pesan-pesan komunikasi yang disampaikan tidak keluar dari agenda yang telah ditetapkan.

Orientasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (42,1%) orientasi pesan dalam rapat adalah untuk memecahkan masalah, sebanyak 32,7% menyudutkan pihak lain, dan sebanyak 25,1 % orientasi eksistensi diri. Artinya anggota Komisi IV lebih banyak menyampaikan pesan dalam rapat untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas.

Dalam rapat anggota Komisi IV juga banyak (32,7%) menyudutkan pihak

lain. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan. Dalam rapat anggota Komisi IV sering mengemukakan fakta di lapangan yang menunjukkan pihak pemerintah yang kurang menjalankan program pemerintahan yang baik. Anggota Komisi IV telah menerima pengaduan dan data dari masyarakat bahwa program pertanian kurang berpihak kepada masyarakat.

Sebanyak 25,1 % orientasi pesan komunikasi yang disampaikan menunjukkan eksistensi diri karena hanya mengulang-ulang pendapat yang dikemukakan peserta lain. Dalam pesan yang disampaikan sekedar menunjukkan kehadiran dan hak yang dimiliki sebagai anggota. Pendapat yang disampaikan dalam eksistensi diri hanya berupa penegasan atas pendapat sebelumnya.

Tingginya pesan yang berorientasi menyudutkan pihak lain terlihat cukup besar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa anggota DPR adalah berperan sebagai pengawas pemerintah. Dalam konteks pengawasan beberapa cara yang dilakukan adalah menyudutkan pihak yang diawasi. Kita lihat bahwa banyak anggota DPR Komisi IV yang memiliki pengalaman priode pertama sebagai anggota DPR.

Sehubungan dengan pengalaman baru bagi sebagian anggota komisi IV DPR perilaku pengawasan akan lebih menonjol. Sebagaimana dijelaskan *novelty theory*, sesuatu yang baru akan lebih menarik perhatian (Coates & Humphreys 2003). Karena menemui sesuatu yang baru kita akan lebih menaruh banyak perhatian. Akibat kebaruan itu cenderung untuk diaktualisasikan dalam kehidupan. Seseorang yang baru memiliki kekuasaan sebagai pengawas, pengawasan yang dilakukan akan lebih intens. Sebagaimana halnya seseorang yang sudah sering dan lama mengerjakan sesuatu secara rutin akan menimbulkan kebosanan. Hal yang

sama juga dikemukakan dalam *hawthorne effect*, di mana perilaku seseorang yang sedang diperhatikan akan memberikan reaksi yang lebih positif daripada yang tidak sadar diperhatikan. (Roethlisberger 1966).

Bila orientasi eksistensi diri digabungkan dengan orientasi menyudutkan pihak lain prosentasinya cukup besar (57,4%). Artinya kedua kelompok ini termasuk pihak yang tidak berorientasi memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Karena dalam pendapat mereka tidak ada ide baru dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bimber, dalam merumuskan kebijakan politik, pendapat yang netral tidak diperlukan dan tidak cukup berguna. Karena pendapat yang netral hampir

sama dengan tidak berpendapat dan tidak memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi, (*dalam* Blevins & Anton, 2008)

Artinya, bila pendapat yang dikemukakan sekedar mendukung pendapat terdahulu berarti tidak menunjukkan adanya solusi yang baru dan hanya menunjukkan posisi pendapat pada salah satu pihak. Pendapat seperti ini lebih condong pada sekedar menunjukkan eksistensi dan posisi politik. Orientasi memecahkan masalah dari pendapat yang mendukung atau netral kurang kuat menunjukkan usaha mencari jalan terbaik dalam menghadapi masalah.

Bila karakteristik dikorelasikan dengan orientasi hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Korelasi antara karakteristik dengan orientasi
N = 633

Orientasi	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Fraksi	Masa Bakti	Pekerjaan
r	-.030	.057	.109**	.058	.005	.042
Sig	.419	.075	.002	.080	.890	.241

** . Korelasi signifikan pada level 0.01.

Tabel 5 menunjukkan tingkat pendidikan berkorelasi signifikan ($r=0,109$ $p=0.002$) dengan orientasi pesan. Artinya perbedaan tingkat pendidikan diikuti oleh perbedaan orientasi pesan komunikasi.

Jenis Alasan

Jenis alasan yang banyak (62,2%) digunakan anggota Komisi IV dalam mendukung pendapatnya adalah gejala. Gejala yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa yang ditemui di lapangan yang diserap selama masa reses atau pengaduan masyarakat. Artinya anggota Komisi IV dalam menyampaikan pendapat dalam rapat cenderung didukung oleh alasan berupa fakta dan data. Hal ini dapat diterima, karena anggota Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja dan pengawasan di lapangan.

Jenis alasan kedua yang banyak (10,1%) diggunakan adalah kriteria,

yaitu patokan tertentu dalam membahas persoalan. Alasan kedua banyak dipakai oleh anggota Komisi IV DPR adalah kriteria (10,1%). Hal ini cukup masuk akal, karena anggota DPR menempatkan diri mereka sebagai pengawas sedikit lebih tinggi dari kementerian. Dalam posisi lebih tinggi ada kecenderungan untuk mengajari atau memberi petunjuk pada yang lebih rendah. Dalam memberi petunjuk atau mengajari tersebut diperlukan suatu kriteria pekerjaan yang baik dan benar. Demikian juga sewaktu menilai suatu pekerjaan pihak lain, diperlukan kriteria untuk menunjukkan keberhasilan pekerjaan tersebut. Karena dengan kriteria itulah alat untuk melakukan evaluasi keberhasilan.

Hanya 7,3 % anggota Komisi IV yang menyampaikan pendapat tanpa alasan. Bentuk alasan logika (9,8%),

sebab akibat (5,8%), dan perbandingan (4,7) lebih sedikit digunakan.

Bila karakteristik dikorelasikan dengan jenis alasan, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Korelasi antara karakteristik dengan jenis alasan pesan

N = 633

Alasan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Fraksi	Masa Bakti	Pekerjaan
R	-.042	.056	.051	-.113*	-.068	-.078*
Sig	.257	.076	.153	.001	.089	.027

** . Korelasi signifikan pada level 0.01.

* . Korelasi signifikan pada level 0.05.

Fraksi berhubungan signifikan ($r = -0,113$ $p = 0,001$) dengan jenis alasan yang digunakan, namun arah hubungan tersebut bersifat negatif. Artinya perbedaan fraksi akan diikuti oleh jenis alasan yang berbeda secara negatif.

Jenis pekerjaan berhubungan signifikan ($r = -0,78$ $p = 0,027$) dengan jenis alasan yang digunakan namun hubungan bersifat negatif. Artinya jenis pekerjaan yang berbeda akan diikuti oleh jenis alasan yang berbeda dalam hubungan negatif.

Bentuk Bukti

Bukti yang paling banyak (45,5%) digunakan oleh Komisi IV dalam menyampaikan pendapat dalam rapat adalah naratif. Urutan kedua dan ketiga bentuk bukti yang digunakan adalah rasionalisasi (21,5%) dan pengalaman langsung (17,1%). Sedangkan bukti yang paling sedikit (0,2%) digunakan adalah demonstrasi.

Anggota Komisi IV yang tidak menyertakan bukti dalam menyampaikan pendapat ditemukan 7,1%. Artinya pendapat yang tidak disertai bukti dihindari oleh anggota Komisi IV. Hal ini dapat dipahami, karena pendapat tanpa dukungan bukti akan terkesan subyektif. Menyampaikan pendapat tanpa dukungan bukti akan menunjukkan kekurangan kemampuan seseorang. Pendapat tanpa bukti juga akan mudah ditolak atau diabaikan oleh pihak lain. Agar pendapat kita tidak dapat dibantah, sertakan bukti yang kuat.

Bukti dengan menggunakan testimony atau merujuk pendapat orang lain jarang digunakan (6.8%). Hal ini dapat dimaklumi. Bila bukti ini yang disampaikan, pelaku telah menunjukkan dirinya kurang menguasai persoalan dan kurang bukti faktual. Seolah-olah yang bersangkutan kurang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Bentuk bukti naratif adalah retorik yang berusaha menjelaskan suatu persoalan sehingga dapat dipahami dan dianggap penting. Dalam bahasa promosi, naratif adalah usaha mendramatisasi fakta sehingga menjadi penting (Shimp 2007). Secara sederhana narasi dikenal sebagai cerita tentang peristiwa yang dirangkai oleh penutur dengan kronolis waktu agar menjadi perhatian pendengarnya. Bukti-bukti yang diperoleh di lapangan dirangkai dalam suatu narasi yang sistematis sehingga menjadi sulit untuk dibantahkan.

Bentuk bukti kedua dan ketiga yang banyak digunakan oleh anggota Komisi IV DPR adalah rasionalisasi (21,5%) dan pengalaman langsung (17,1%). Hal ini juga memberikan bukti yang cukup kuat. Karena argumentasi yang rasional dan logis serta pengalaman langsung akan sulit dibantah. Walaupun rasional dan pengalaman langsung belumlah menjadi kekuatan mutlak dalam bukti, tetapi rasionalitas dan pengalaman langsung merupakan suatu indikasi orang yang bersangkutan memiliki bukti dia telah melaksanakan pekerjaan sebagai mitra dan pengawas pemerintah.

Bila karakteristik dikorelasikan dengan bentuk bukti, hasilnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Korelasi antara karakteristik dengan bentuk bukti

N = 633

Bukti	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Fraksi	Masa Bakti	Pekerjaan
r	-.149**	.012	-.045	.001	.033	.021
Sig	.000	.709	.192	.975	.332	.546

** . Korelasi signifikan pada level 0.01.

Dari tabel di atas dapat diketahui variabel jenis kelamin berkorelasi dengan bentuk bukti. Jenis kelamin yang berbeda berhubungan signifikan ($r = -0,149$ $p = 0,000$) dengan bentuk bukti yang disampaikan. Artinya jenis kelamin yang berbeda akan diikuti oleh penyampaian bentuk bukti yang berbeda pula.

Hal ini dapat diterima, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda (Kroløkke & Sørensen 2006). Cara berkomunikasi yang berbeda tersebut termasuk berbeda kandungan bukti dalam pesan yang disampaikan.

Akomodatif

Sebagian besar (65,1%) anggota Komisi IV dalam rapat bersifat akomodatif (bersedia menerima) akomodatif. Setelah pendapat mereka dijawab oleh pihak Kementerian Pertanian anggota Komisi IV cenderung menerima jawaban tersebut. Hanya sebagian kecil (34,9%) yang bersifat tidak akomodatif.

Menjadi menarik sikap akomodatif yang telah ditunjukkan anggota Komisi IV. Anggota Komisi IV jarang yang bersikeras (*ngotot*) dalam menyampaikan pendapat kepada Kementerian Pertanian. Jawaban yang diberikan oleh Kementerian Pertanian cenderung diterima. Pihak Kementerian Pertanian dapat diduga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat dengan mudah membuat anggota Komisi IV menerima jawaban. Anggota

Komisi IV cepat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.

Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kesediaan menerima. Hal ini sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Dimana perbedaan sifat psikologis dan biologis antara perempuan dan laki-laki membawa perbedaan pada cara mensikapi pesan orang lain (Kotler & Amstrong 1991) dan (Schroder 2008).

Sedangkan perbedaan umur, pengalaman dan tingkat pendidikan ternyata membawa perbedaan pada kesediaan menerima. Hal ini sesuai dengan *cognitive complexity* yang dikemukakan oleh Delia (*dalam* Griffin 2006). Seseorang telah meng-konstruksi persepsinya terhadap kehidupan. Bagi orang yang memiliki kognitif yang kompleks maka akan lebih memiliki kemampuan hidup sosial lebih baik. Orang seperti ini akan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan.

Kognitif yang bersifat kompleks memiliki kemampuan komunikasi dan daya argumentasi dalam menghadapi permasalahan. Sedangkan kognitif yang kurang kompleks kurang mampu berkomunikasi sehingga sering menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan marah (emosi).

Dapat dijelaskan bahwa kesediaan menerima (sifat akomodatif) anggota Komisi IV terhadap pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian disebabkan oleh keadaan kognitif anggota DPR yang sudah kompleks. Sehingga dalam

menanggapi persoalan-persoalan lebih dapat menerima atau bersifat akomodatif.

Kejelasan

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (89,91%) pesan yang disampaikan dalam rapat menggunakan kalimat yang jelas. Hanya sebagian kecil (10,09%) yang tidak jelas. Dta tersebut memberikan arti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian menggunakan kalimat yang jelas.

Kalimat yang tidak jelas (10,09%) merupakan kalimat yang mengandung istilah-istilah asing. Anggota Komisi IV DPR cukup sedikit menggunakan istilah asing. Penggunaan istilah atau bahasa asing dalam rapat sedikit digunakan. Gambaran ini merupakan hal positif. Anggota Komisi IV DPR RI menyukai Bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam rapat.

Kalimat yang digunakan oleh anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian 2010 (89,91 %) disampaikan dengan jelas. Ini merupakan gambaran penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa dan kalimat anggota Komisi IV DPR RI sangat bagus. Ini merupakan gambaran bahwa anggota DPR adalah orang memiliki integritas tinggi dalam berbahasa Indonesia. Data ini juga memberi petunjuk bahwa anggota DPR terdidik dan terlatih dalam menyampaikan pendapat kepada pihak lain.

Bahasa dan kalimat yang digunakan sedikit yang kurang jelas (sulit dipahami). Kalimat yang kurang jelas disebabkan susunannya kurang sistematis dan menggunakan istilah asing. Menurut Gamble dan Gable (2005) kejelasan bahasa adalah menunjukkan cara berpikir. Bila bahasa yang digunakan jelas, maka cara

berpikir yang bersangkutan adalah sistematis atau sebaliknya.

Cara Penyampaian Pesan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (51,98%) strategi penyampaian yang digunakan adalah Asertif. Strategi penyampaian pesan yang kedua banyak digunakan adalah Direktif (26,86%). Sedangkan strategi penyampaian pesan yang paling jarang digunakan adalah Deklaratif (3,64%).

Penggunaan asertif dapat dimaklumi, karena setiap berbicara anggota Komisi IV DPR selalu didahului kalimat asertif atau penghormatan terhadap orang lain. Budaya menghormati banyak diterapkan dalam rapat dengar pendapat antara Anggota Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

Sedangkan strategi Direktif adalah memberikan perintah atau pengarahan kepada pihak lain. Strategi Direktif kedua terbanyak yang digunakan karena Anggota merasa wakil rakyat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan inilah Anggota Komisi IV DPR menggunakan kalimat-kalimat ujaran perintah. Hal ini dapat terlihat ketika pendapat-pendapat yang disampaikan sudah beberapa kali, tetapi pihak Kementerian Pertanian belum melaksanakan, maka anggota DPR lebih telah memerintahkan. Kesan sebagai pengawas pemerintah tindakan menggunakan kalimat perintah sangat wajar digunakan.

Bentuk ini banyak digunakan karena budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia yang selalu memberi rasa hormat pada lawan bicara. Kebiasaan menggunakan bentuk asertif merupakan gambaran bahwa pelaku menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Walaupun teman berbicara adalah lawan politik atau musuh, orang

Indonesia cenderung mengedepankan penghormatan.

Di sisi lain, Bangsa Indonesia pada umumnya tidak menyukai komunikasi yang menelanjangi pribadi orang di depan umum seperti dalam rapat. Bangsa Indonesia masih syarat dengan sopan santun. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward T. Hall (*dalam Griffin 2006*) masyarakat memiliki dua karakter budaya komunikasi yaitu *high-context culture (collectivistic)* dan *low-context culture (individualistic)*.

Dalam masyarakat yang memiliki budaya komunikasi konteks rendah, pesan komunikasi mudah dipahami karena diutarakan secara eksplisit. Sedangkan masyarakat yang memiliki budaya konteks tinggi, pesan komunikasi sulit ditafsirkan maksudnya karena implicit. Budaya komunikasi konteks tinggi termasuk bangsa di Asia dan budaya komunikasi konteks rendah adalah bangsa Eropa dan Amerika.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Gamble dan Gamble (2005), Philipsen (*dalam Griffin 2006*), dan Carte dan Fox (2006) bahwa cara komunikasi dipengaruhi oleh budaya.

Setiap budaya memiliki gaya berkomunikasi.

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, bentuk komunikasi yang banyak digunakan oleh anggota Komisi IV DPR dalam rapat pendapat dengan Kementerian Pertanian dipengaruhi oleh budaya timur yang selalu menghormati lawan komunikasinya.

Bentuk komunikasi deklaratif jarang digunakan (3,64%) karena sifat kalimat seperti ini tidak tepat disampaikan dalam rapat. Deklaratif adalah kalimat yang memastikan sesuatu akan terjadi dan mendeklarasikan atas suatu persoalan. Kalimat deklaratif menunjukkan kekuasaan penuh ada pada si penutur. Sementara dalam rapat dengar pendapat adalah suatu pertemuan diskusi untuk membahas langkah-langkah pemecahan masalah secara bersama-sama.

Korelasi antara pesan

Namun bila jenis agenda rapat dikorelasikan dengan variabel muatan kepentingan, substansi, orientasi, jenis alasan, bentuk bukti dan akomodatif dapat dilihat gambarannya sebagai berikut:

Tabel 8. Korelasi antara jenis agenda rapat dengan muatan kepentingan, kesesuaian, orientasi, jenis alasan, bentuk buki dan akomodatif)

N= 4605

Jenis rapat	Kepentingan	Substansi	Orientasi	Jenis alasan	Bentuk bukti
r	-.054	-.032	.171**	-.063	-.040
Sig	.109	.356	.000	.054	.220

** . Korelasi signifikan pada level 0.01.

Dari tabel tersebut dapat diketahui jenis agenda rapat berhubungan signifikan (r=0.171 p=0.000) dengan orientasi. Artinya perbedaan jenis agenda rapat diikuti oleh perbedaan orientasi pesan.

Anggota DPR sebagai aktor komunikasi politik

Dalam dunia politik hidup bagai panggung sandiwara. Perilaku komunikasi para aktor politik sulit ditebak arah dan maksud khususnya bagi orang awan. Peran-peran yang mereka pertontonkan sulit menjadi acuan bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Edelman sifat konstitutif politik dan retorika politik adalah sulit untuk ditafsirkan dan kadang bersifat kontroversial. Kondisi itulah yang

membuat mereka disebut orang politik. (*dalam* Blevins & Anton, 2008).

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian terjadi komunikasi politik. Sebagai lembaga politik, anggota DPR dituntut untuk menjalankan peran tertentu seperti pengawas pemerintah, pendukung pemerintah, penyampai aspirasi rakyat, dan lain-lain. Sewaktu anggota Komisi IV berinteraksi dengan Kementerian Pertanian dalam rapat dengar pendapat telah menjalankan peran sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Erving Goffman (*dalam* Ritzer 2003) interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan drama di atas pentas. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui "pertunjukan dramanya sendiri". Dalam mencapai tujuannya tersebut, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, aktor juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain. Hal ini dilakukan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan.

Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung ("*front stage*") dan di belakang panggung ("*back stage*") drama kehidupan. Kondisi akting di *front stage* terdiri dari dua bagian yaitu *setting* dan *front personal*. *Setting* mengacu pada pemandangan fisik yang harus ada jika harus menjalankan peran. Sedangkan *front personal* terdiri dari berbagai macam perlengkapan yang bersifat menyatakan perasaan.

Goffman (*dalam* Ritzer 2003) juga membagi *front personal* menjadi

dua yaitu penampilan dan gaya. Penampilan adalah berbagai jenis barang yang menunjukkan status sosial aktor. Sedangkan gaya adalah tindakan yang diharapkan penonton untuk dimainkan. *Front stage* adalah pertunjukan aktor dan aktor sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu aktor berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilakunya.

Sedangkan *back stage* adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan.

Dalam kaitan dengan rapat dengar pendapat antara anggota Komisi IV dengan Kementerian pertanian, masing-masing pihak dalam rapat telah memainkan drama komunikasi politik. Panggung depan bagi anggota Komisi IV berbicara menyuarakan atas nama kepentingan rakyat dengan retorika sedemikian rupa sehingga orang lain memandangnya telah menjalankan peran yang seharusnya. Konteks rapat dengar pendapat telah membawa perilaku mereka para peran seorang wakil rakyat. Sementara di panggung belakang anggota Komisi IV adalah anggota masyarakat yang berperilaku spontan seperti orang kebanyakan sewaktu berada dalam keluarga atau sahabatnya.

Intinya dalam interaksi sosial kita sering menyembunyikan sesuatu untuk mendukung peran dan tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan adalah rekayasa peran tingkat tinggi agar kita tidak salah di depan publik.

5. SIMPULAN

Perilaku komunikasi anggota komisi IV DPR RI dalam rapat pendapat dengan kementerian pertanian 2010 menunjukkan bahwa terdapat

kesadaran yang tinggi dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini tergambar dari muatan pesan yang disampaikan lebih dominan untuk kepentingan masyarakat. Setiap acara rapat dengar pendapat para anggota berorientasi pada pemecahan masalah yang menjadi agenda rapat. Namun bila ditinjau dari permasalahan agenda yang penting untuk rakyat (petani) komisi IV masih kurang perhatian

Sedangkan dari strategi komunikasi yang dilakukan, anggota komisi IV lebih bersifat akomodatif, mengutarakan pendapat dengan kalimat yang jelas, gaya asertif (penuh penghormatan) dengan penyertaan bukti dan alasan yang kuat.

Perilaku komunikasi yang dipertunjukkan sudah cukup baik, namun perlu perhatian agenda rapat yang lebih berpihak pada kepentingan petani sebagai konstituen yang dominan di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Brookers, Wills (1998) *Cultural Studies*, Hodder Headline Plc., London.

Carte, Penny and Fox, Chris (2006), *Bridging the Culture Gap: A Practical Guide to International Business Communication* (alihbahasa: Anggraeni, PT. Indeks, Jakarta

Emmert, Philip & Barker, Larry L., (1989) *Measurement of Communication Behavior*, Longman, New York.

Esser, Frank & Pfetsch, Barbara (2004) *Coparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges*, Cambridge Univerisity Press, UK.

Fisher, B. Aubrey, (1986) *Teori-Teori Komunikasi*, disunting Jalaluddin

Rakhmat, Remadja Karya, Bandung.

Gamble, Teri Kwal and Gamble, Michael, (2005) *Communication Work*, Eight edition, McGraw Hill, Boston.

Goldberg, Alvin A. & Larson, Carl E., (1985) *Komunikasi Kelompok, Proses-proses diskusi dan penerapannya*, alihbahasa Koesdarini Sumuati dan Gary R. Jusuf, UI-Press, Jakarta.

Griffin, EM. (2006) *A First Look At Communication Theory*. Sixth edition. America, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Kippendorf, Klaus, (1993) *Analisis Isi: Pengantar ke Metodologi*, Alihbahasa Farid Waliji, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Santoso, F. Harianto, dkk. (2010) *Wajah DPR dan DPD 2009-2014, Latarbelakang Pendidikan dan Karir*, Kompas, Jakarta,

Kroløkke, Charlote and Sørense, Anne Scott (2006) *Gender Communication Theoris and Analyses From Science To Performance*, Sage Publications, London.

Kotler, Philip & Amstrong, Gary, (1991) *Principle of Marketing*, Fifth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Larson, Charles U., (2004) *Persuasion: Reception and Responsibility*, Tenth edition, Thomson Warsworth, Belmont, California.

Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A., (2008) *Theories of Human Communication*, Ninth Edition, Thomson Wadsworth, Belmont.

Lowery, Shearon A. & DeFleur, Melvin L., (1995) *Milestones in Mass Communication Research: Media Effects*, Third edition, Longman, New York, USA.

Newman, Bruce I., (1999) *Handbook of Political Marketing*, Sage Publication, London.

- Newsom, Doug & Carrell, Bob (2001) *Public Relations Writing: Form and Style*, Sixth edition, Wadsworth Thomson Learning, Belmont, California.
- Nimmo, Dan (2004), *Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media)*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J., (2005) *Teori Sosiologi Modern*, edisi keenam, diterjemahkan oleh Alimandan, Prenada Media, Jakarta.
- Rush, Michael & Althoff, Phillip, (2002) *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Rajawali Press.
- Shimp, Terence A., (2007) *Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion*, Thomson South-Western, China.
- Scudder, Joseph, (2004) "Social Scientific Approaches to Persuasion", dalam Charles U. Larson, *Persuasion: Reception and Responsibility*, Tenth edition, Thomson Wadsworth, Toronto, Canada.
- Severin, Werner J. & Tankard, James W., (2005) *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Alihbahasa: Sugeng Hariyanto, Prenada Media, Jakarta.
- Soetjipto, Ani W., (2000) Hak-Hak Politik Wanita Indonesia: Refleksi dan Perjuangan di Era Reformasi, dalam Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung.
- Stempel III, Guido H.; Weaver, David H; Wilhoit, G. Cleveland (Editor) (2003) *Mass Communication Research and Theory*, Pearson Education, New York.
- Wimmer, Roger D. and Dominick, Joseph R., (2000) *Mass Media Research An Introduction*, Wadsworth Publishing Company, Belmont C.A.
- Sumber lain:**
- Anderson , Carolyn M. and Martin, Matthew M. (1995) The Effects of Communication Motives, Interaction Involvement, and Loneliness on Satisfaction : A Model of Small Groups, *Small Group Research* 1995 26: 118, Jurnal sagepub.online <http://sgr.sagepub.com/content/26/1/118>, diunduh 24 Oktober 2010.
- Biro Pusat Statistik, (2009) Data Tenaga Kerja Indonesia 2009. <http://www.bps.or.id> (diunduh 29 September 2011)
- Blevins, Jeffrey Layne and Anton, Fernando, (2008) Muted voices in the legislative process: the role of scholarship in US Congressional efforts to protect children from internet pornography, *New Media Society* 2008 10: 115, (diunduh 28 November 2011 pukul 13.00)
- DPR-RI, Mitra kerja Komisi DPR-RI 2009-2014, <http://www.dpr.go.id/id/Komisi/Komisi-IV> (diakses 19 Oktober 2010)
- Coates, Dennis and Humphreys, Brad R. (2003), Novelty Effects of New Facilities on Attendance at Professional Sporting Events, *UMBC Economics Department Working Paper 03-101*, http://www.umbc.edu/economics/wpapers/wp_03_101.pdf, diunduh 12 Desember 2011 pkl 23.00 WIB)
- Ilham, Nyak, (2010) *Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010*, <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART4-2b> (diunduh 28 November 2011 pukul 13.30)

Kaptein, Victor & Nardi, Bonnie A., (1997) *Activity Theory: Basic Concepts and Applications*, <http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/tutorial/bn.htm#U6> (diunduh 30 November 2011 pukul 10.00)

Masaki, Yoshitake (2004) Critique of J. L. Austin's Speech Act Theory: Decentralization of the Speaker-Centered Meaning in Communication, *Kyushu Communication Studies*. 2004. 2:27-43, http://www.caj1971.com/~kyushu/KCS_02_Yoshitake.pdf, (diunduh 16 Januari 2011)

Oishi, Etsuko, (2006) *Austin's Speech Act Theory and the Speech Situation*, *Esercizi Filosofici* 1, 2006, pp. 1-14 ISSN 1970-0164 link: <http://www.univ.trieste.it/~eserfilo/art106/oishi106.pdf>, (diunduh 16 Januari 2011)

Poythress, Vern Sheridan (2008) Canon and Speech Act: Limitations in Speech-Act Theory, with Implications for a Putative Theory of Canonical Speech Acts, Published in the *Westminster Theological Journal* 70 (2008): 337-354, http://www.frame-poythress.org/poythress_articles/2008Canon.pdf, (diunduh 16 Januari 2011),

Roethlisberger, (1966) The Hawthorne Effects, *Historian Collection #9*, Baker Library, Harvard Business School, <http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/09.html#nine>, diunduh 12 Desember 2011 pukul 23.30)

Yu, Chong Ho, (2002) Applications of John Austin's Speech-Act Theory to Chinese and American Contexts, <http://www.pdfchaser.com/Applications-of-John-Austin's->

[Speech-Act-Theory-to-Chinese-and-....html](#) (diunduh 16 Januari 2011).